

Politik Klaim Kewargaan Masyarakat Nelayan dalam Relasi Negara dan Warga: Studi Kasus di Kabupaten Takalar

The Politics of Citizenship Claims among Fishing Communities in State-Citizen Relations: A Case Study of Takalar Regency

Miftahul Karima¹, Andi Yakub², Haryanto³

¹ Program Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

^{2,3} Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Correspondent Author: : karimam19e@student.unhas.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p><i>Citizenship, Citizen Claim-Making, Fishermen, Patronage, state-citizen relations</i></p>	<p>This study aims to understand how fishing communities in Aeng Batu-Batu Village, Takalar Regency, construct and negotiate their citizenship claims in their interactions with the state. Using a descriptive qualitative approach within the framework of political sociology, this research explores the social and political practices underlying state-citizen relations in the context of social welfare. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis involving 20 informants, including fishermen, village officials, and local figures. The findings reveal three primary forms of citizen claim-making: direct claims to authorities, mediated claims through social intermediaries or political brokers, and collective claims through fishermen’s groups. These forms demonstrate that access to social policies remains highly dependent on patronage networks and personal relationships with local actors. In this context, the state does not function as a neutral institution but rather as a social arena where citizens negotiate their rights through adaptive strategies. Although patron-client relations remain dominant, the study also identifies emerging forms of reflective citizenship, particularly among younger fishermen who use social media to voice injustices. The results affirm that local citizenship practices are dynamic, relational, and continuously shaped through the ongoing process of claim-making that mediates the interaction between citizens and the state.</p>

<p>Kata kunci:</p> <p><i>Kewargaan, Klaim Kewargaan, Nelayan, Patronase, Relasi Negara-Warga</i></p> <p>DOI: 10.63280/jpsd.v2i1.48652</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat nelayan di Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, membangun dan menegosiasikan klaim kewargaan mereka dalam interaksi dengan negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam kerangka sosiologi politik, penelitian ini berupaya mengungkap praktik sosial dan politik yang melandasi hubungan antara warga dan negara dalam konteks kesejahteraan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen terhadap 20 informan yang terdiri atas nelayan, aparat desa, dan tokoh lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim kewargaan masyarakat nelayan dilakukan melalui tiga bentuk utama: klaim langsung kepada aparat, klaim melalui perantara sosial atau broker politik, dan klaim kolektif melalui kelompok nelayan. Bentuk-bentuk klaim ini memperlihatkan bahwa akses terhadap kebijakan sosial masih sangat bergantung pada jaringan patronase dan hubungan personal dengan aktor lokal. Dalam konteks ini, negara hadir bukan sebagai institusi yang netral, melainkan sebagai arena negosiasi sosial di mana warga menegosiasikan hak-hak mereka melalui strategi yang adaptif. Meskipun pola hubungan patronase masih kuat, penelitian ini juga menemukan munculnya bentuk kewargaan baru yang lebih reflektif, terutama di kalangan generasi muda nelayan yang mulai menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakadilan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kewargaan di tingkat lokal bersifat dinamis, relasional, dan terus berkembang melalui praktik <i>claim making</i> yang menjadi ruang negosiasi antara warga dan negara.</p> <p style="text-align: right;">Copyright © 2026 JPSD. All rights reserved.</p>
---	---

1. Pendahuluan

Perdebatan tentang kewargaan (*citizenship*) dalam ilmu sosial dan politik mengalami perkembangan penting dalam dua dekade terakhir. Kewargaan tidak lagi dipahami semata sebagai status hukum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai praktik sosial dan politik yang dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini berpindah dari kerangka klasik Marshall (1950) yang menekankan dimensi sipil, politik, dan sosial kewargaan menuju pendekatan yang lebih dinamis dan relasional, di mana warga bukan sekadar penerima kebijakan negara, tetapi aktor yang aktif membangun klaim terhadap negara (Isin & Turner, 2002; Clarke et al., 2014). Dalam konteks ini, kewargaan menjadi arena di mana relasi kekuasaan, identitas sosial, dan akses terhadap sumber daya dinegosiasikan secara terus-menerus.

Dalam negara berkembang seperti Indonesia, praktik kewargaan sering kali dijalankan dalam konteks yang kompleks antara negara dan masyarakat lokal. Negara hadir tidak hanya melalui kebijakan publik, tetapi juga melalui mekanisme administratif dan hubungan patronase yang memediasi akses warga terhadap hak-hak sosial (Hadiz & Robison, 2013). Akses terhadap program kesejahteraan, bantuan sosial, dan kebijakan ekonomi lokal kerap bergantung pada jaringan sosial, kedekatan politik, dan kemampuan warga untuk menegosiasikan posisi mereka dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, studi tentang kewargaan di Indonesia perlu menyoroti bagaimana warga di tingkat akar rumput melakukan praktik klaim kewargaan dalam kerangka relasi kekuasaan yang tidak seimbang.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek utama adalah nelayan karena dianggap sebagai kelompok masyarakat yang identik dengan kemiskinan sebagai masalah utama yang dihadapi. Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial yang paling relevan untuk dikaji dalam konteks ini. Sebagai kelompok ekonomi yang hidup di wilayah pesisir dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan kebijakan negara. Sehingga kelompok nelayan sering kali berada dalam posisi rentan secara sosial dan politik. Mereka bergantung pada kebijakan pemerintah dalam berbagai hal, mulai dari perizinan penangkapan ikan, subsidi bahan bakar, hingga program bantuan sosial (Syarif & Maddatuang, 2023). Namun, posisi mereka sebagai warga negara sering kali dilemahkan oleh struktur sosial lokal yang hierarkis, dominasi elite desa, dan lemahnya akses terhadap representasi politik formal (Satria, 2015; Pelras, 2006).

Dalam situasi seperti ini, nelayan tidak sepenuhnya pasif. Mereka mengembangkan berbagai strategi untuk menegosiasikan hak-haknya melalui praktik sosial dan politik yang disebut sebagai *citizen claim making* (Kruks-Wisner, 2018). Konsep ini menekankan bahwa kewargaan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara secara otomatis, tetapi dibangun melalui tindakan warga yang berupaya mengajukan klaim terhadap negara dalam berbagai bentuk – mulai dari permohonan resmi, mediasi melalui perantara politik, hingga bentuk-bentuk negosiasi informal di tingkat lokal. Klaim tersebut dapat berupa permintaan bantuan sosial, pengakuan hak atas sumber daya, atau akses terhadap layanan publik.

Berbagai hasil kajian penelitian selama ini tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan telah mengungkapkan bahwa sebagian besar mereka tergolong nelayan buruh atau nelayan-nelayan kecil (Syam, 2014; Siregar et al., 2017; Aryanto et al., 2017). Kemampuan mereka memenuhi kehidupan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Bagi masyarakat nelayan, diantara beberapa jenis kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan yang paling penting adalah pangan dan papan. Desa Aeng Batu-Batu terletak pada kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dimana wilayah geografisnya berada di pesisir pantai Galesong sehingga aktivitas keseharian penduduknya bertumpu pada laut. Mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Desa Aeng Batu-Batu sebagian besar bekerja sebagai nelayan buruh dan nelayan perorangan dengan persoalan utama masih bergelut pada garis kemiskinan (Suryaningsi, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar membangun dan menegosiasikan klaim kewargaan terhadap negara. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kewargaan bukan sekadar status formal, melainkan hasil dari proses sosial yang diproduksi melalui interaksi antara warga dan negara di tingkat lokal. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik dan kerangka teori *citizen claim making*, penelitian ini ingin menjelaskan dinamika antara hak, relasi sosial, dan praktik kekuasaan yang membentuk kehidupan kewargaan masyarakat nelayan.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk klaim kewargaan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dalam mengakses hak-hak sosial dan ekonomi. Kedua, menganalisis bagaimana relasi sosial dan politik lokal memengaruhi keberhasilan atau kegagalan klaim tersebut. Ketiga, memahami bagaimana praktik kewargaan ini mencerminkan bentuk relasi antara negara dan warga di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada studi kewargaan di Indonesia, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana kelompok marjinal bernegosiasi dengan negara dalam konteks demokrasi yang masih berkembang.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Kewargaan

Pemikiran awal tentang kewargaan (kewarganegaraan) secara klasik dikemukakan oleh Marshall (1950) dalam karya monumentalnya *Citizenship and Social Class*. Marshall (1950) memandang kewargaan sebagai perkembangan sejarah yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil meliputi kebebasan individu seperti hak milik dan kebebasan berpendapat. Hak politik mencakup partisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan hak sosial mencakup akses terhadap kesejahteraan dan standar hidup yang layak. Marshall (1950) berpendapat bahwa kesejahteraan sosial merupakan puncak dari proses evolusi kewargaan modern karena menjamin kesetaraan substantif di antara warga negara. Meskipun pemikiran Marshall (1950) tertanam dalam konteks Eropa pasca-Perang Dunia II, gagasannya memberikan dasar bagi studi-studi tentang hubungan antara negara, warga, dan kesejahteraan di negara-negara berkembang.

Namun pendekatan Marshall kemudian banyak dikritik karena dianggap terlalu normatif dan bersifat eurosentris. Isin dan Turner (2002) memperluas konsep kewargaan dengan tekanan aspek praksis, performatif, dan politik dari tindakan warga. Mereka berargumen bahwa kewargaan tidak hanya berarti status hukum yang diberikan oleh negara, tetapi juga mencakup praktik sosial yang membentuk hubungan antara warga dan kekuasaan. Isin dan Turner (2002) memperkenalkan konsep tindakan kewarganegaraan untuk menggambarkan tindakan-tindakan warga yang secara aktif menegosiasikan, menantang, atau menuntut hak dari negara. Dengan kata lain, kewargaan bukanlah kondisi statistik, melainkan sebuah proses sosial dan politik yang selalu dinegosiasikan melalui tindakan nyata di ruang publik.

Turner (2001; 2009) kemudian menekankan bahwa kewargaan harus dipahami dalam konteks globalisasi dan neoliberalisme yang mengubah hubungan antara negara dan warga negara. Menurutnya, kewargaan modern menghadapi tantangan berupa ketimpangan ekonomi, kekesalan kerja, dan fragmentasi identitas sosial. Dalam situasi ini, negara tidak selalu menjadi satu-satunya sumber legitimasi kewargaan, karena hak dan kewajiban warga kini juga ditentukan oleh aktor non-negara, seperti organisasi internasional, pasar, dan komunitas transnasional. Turner menyebut fenomena ini sebagai bentuk kewarganegaraan pasca-nasional, di mana hak-hak warga negara dapat melampaui batas-batas negara bangsa.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, konsep Marshall (1950), Isin, dan Turner (2002) memberikan landasan penting untuk memahami bahwa kewargaan bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga praktik sosial-politik yang bersifat dinamis. Warga di tingkat lokal tidak hanya menjalankan kewargaan sebagai status, namun juga sebagai strategi sosial untuk mengakses hak-hak ekonomi dan politik. Dengan demikian, teori kewargaan modern memandang bahwa hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik, di mana warga dapat menjadi subjek aktif yang bernegosiasi dengan negara untuk menuntut pengakuan dan keadilan sosial.

2.2 Konsep Pembuatan Klaim Warga Negara

Konsep pembuatan klaim warga muncul dari pergeseran paradigma kewargaan yang menekankan peran aktif warga dalam membentuk hubungan dengan negara. Salah satu tokoh kunci dalam kajian ini adalah Kruks-Wisner (2018). Ia berargumen bahwa warga negara, terutama di masyarakat pedesaan, tidak pasif dalam menghadapi kebijakan negara, tetapi terlibat dalam proses yang kompleks untuk menuntut hak-hak sosial melalui berbagai bentuk klaim. Klaim tersebut bisa bersifat langsung, seperti pengaduan kepada pejabat publik, maupun tidak langsung, melalui perantara sosial seperti tokoh masyarakat, pemimpin lokal, atau politisi.

Kruks-Wisner (2018) mendefinisikan pembuatan klaim warga sebagai proses di mana warga berinteraksi dengan negara untuk mengakses sumber daya, layanan, dan pengakuan. Praktik ini sangat bergantung pada kondisi sosial, struktur kekuasaan lokal, dan kapasitas warga untuk bernegosiasi. Dalam konteks negara berkembang, di mana sistem birokrasi sering kali tidak merata dan hubungan kekuasaan bersifat hierarkis, klaim kewargaan tidak selalu berlangsung melalui mekanisme formal, melainkan melalui jaringan informal yang diberlakukan pada patronase dan solidaritas sosial.

Pendekatan Kruks-Wisner (2018) mengungkapkan bahwa kewargaan tidak hanya ditentukan oleh desain institusional negara, tetapi juga oleh kemampuan warga untuk “mengklaim negara” melalui berbagai bentuk tindakan politik dan sosial. Dengan demikian, klaim kewargaan menjadi cara warga menanamkan hak mereka sekaligus menguji batas-batas legitimasi negara.

Sementara itu, Koopmans dan Statham (1999; 2000) dimensi stres kolektif dari pembuatan klaim dalam konteks politik kontemporer. Dalam pandangan mereka, klaim kewargaan merupakan bagian dari proses komunikasi politik antara warga dan negara yang terjadi melalui ruang publik, baik melalui aksi kolektif, protes, maupun partisipasi dalam lembaga formal. Mereka memandang pembuatan klaim sebagai bagian dari “mediasi politik” di mana warga menggunakan berbagai saluran untuk menuntut hak, mempengaruhi kebijakan, dan membentuk opini publik.

Koopmans dan Statham (1999) juga memperkenalkan pendekatan analisis klaim politik, yaitu metode untuk menganalisis bagaimana klaim warga terhadap negara diwujudkan, direspons, dan diartikulasikan melalui media dan institusi politik. Pendekatan ini relevan dalam konteks masyarakat demokratis di mana partisipasi warga tidak selalu diwujudkan dalam bentuk formal seperti pemilu, tetapi juga melalui praktik diskursif dan simbolik.

Dalam konteks masyarakat lokal seperti nelayan di Takalar, konsep pembuatan klaim warga dapat membantu menjelaskan bagaimana warga menegosiasikan hak-haknya di tengah struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Praktik klaim kewargaan di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada kesadaran hak, tetapi juga pada jaringan sosial, hubungan patron-klien, dan kemampuan adaptif warga dalam menangani birokrasi yang kompleks.

2.3 Hubungan Negara-Warga dan Politik Kesejahteraan di Indonesia

Hubungan antara negara dan warga di Indonesia terbentuk oleh sejarah panjang intervensi negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sejak masa Orde Baru, negara memainkan peran sentral dalam menentukan siapa yang berhak atas sumber daya dan bantuan sosial melalui mekanisme birokrasi yang bersifat top-down (Robison & Hadiz, 2004). Meskipun era reformasi membawa desentralisasi dan demokratisasi, pola hubungan hierarkis ini masih bertahan, terutama di tingkat lokal. Warga sering kali berinteraksi dengan negara bukan sebagai pemegang hak, melainkan sebagai penerima manfaat yang bergantung pada kebijakan elite politik.

Dalam kerangka bantuan politik kesejahteraan, Indonesia mengalami perluasan program sosial sejak tahun 2000-an, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Indonesia Pintar. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi program-program tersebut masih diwarnai oleh bias politik, ketimpangan akses, dan praktik patronase (Antlöv et al., 2016; Berenschot, 2019). Mekanisme distribusi bantuan sering kali dipengaruhi oleh hubungan personal antara aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga penerima, sehingga menimbulkan bentuk kewargaan yang bersifat klientelistik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kewargaan di Indonesia dijalankan dalam kerangka yang tidak sepenuhnya universal. Akses terhadap hak-hak sosial sering kali bergantung pada kemampuan warga untuk bernegosiasi dan berpartisipasi dalam jaringan kekuasaan lokal. Relasi negara-warga dalam konteks ini bersifat ambivalen: negara diharapkan hadir untuk melindungi warga negara, namun pada saat yang sama menjadi sumber ketidakadilan melalui kebijakan yang tidak merata.

Studi-studi tentang politik kesejahteraan di Indonesia juga menyoroti munculnya bentuk-bentuk kewarganegaraan partisipatif di tingkat lokal, di mana warga mulai menggunakan forum-forum seperti musyawarah desa, kelompok nelayan, dan lembaga masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya (Savirani & Aspinall, 2017). Namun, partisipasi tersebut masih sering dibatasi oleh ketimpangan sosial dan ketergantungan ekonomi, sehingga kewargaan partisipatif belum sepenuhnya mampu menantang hubungan kekuasaan yang ada.

Dalam konteks masyarakat nelayan, hubungan negara-warga sering kali dimediasi oleh aparat desa atau kelompok elit lokal yang memiliki kekuasaan dalam menentukan penerima bantuan dan program pembangunan. Situasi ini menciptakan bentuk kewargaan yang adaptif, di mana nelayan mengembangkan negosiasi dan klaim strategi untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya. Relasi tersebut mencerminkan bahwa politik kesejahteraan di Indonesia tidak hanya mencakup materi distribusi, tetapi juga mencakup pengakuan sosial dan legitimasi politik antara warga dan negara.

Dengan demikian, memahami praktik klaim kewargaan masyarakat nelayan berarti memahami bagaimana struktur kekuasaan, kebijakan sosial, dan strategi warga berinteraksi dalam konteks kesejahteraan yang timpang. Analisis ini memberikan kontribusi penting untuk memperluas pemahaman tentang demokrasi dan kewargaan di Indonesia, terutama dalam melihat bagaimana warga marjinal menegosiasikan posisi mereka di antara tuntutan kebutuhan ekonomi dan dinamika politik lokal.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif sosiologi politik untuk memahami bagaimana masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar membangun dan menegosiasikan klaim kewargaan dalam interaksinya dengan negara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna sosial, pengalaman, dan strategi warga dalam konteks sosial-politik yang kompleks. Pendekatan sosiologi politik membantu menjelaskan hubungan antara struktur kekuasaan lokal, kebijakan publik, dan tindakan warga dalam membentuk praktik kewargaan di tingkat akar rumput.

Penelitian dilakukan di dua desa pesisir di Kabupaten Takalar, yaitu Desa Aeng Batu-Batu yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda namun sama-sama menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada sektor perikanan. Lokasi ini dipilih secara purposif karena keduanya menjadi lokasi program bantuan pemerintah yang cukup aktif, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan alat tangkap nelayan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan memilih lokasi tersebut, penelitian ini dapat mengamati variasi strategi warga dalam mengakses hak-hak sosial dan berinteraksi dengan struktur pemerintahan lokal.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 20 informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial dan politik desa. Informan terdiri atas 12 nelayan laki-laki dan 3 perempuan nelayan, 2 aparat desa, 2 tokoh masyarakat, dan 1 perantara politik (broker) yang sering membantu warga mengurus bantuan sosial. Kriteria pemilihan informan meliputi: (1) memiliki pengalaman dalam mengakses program bantuan pemerintah atau kebijakan sosial; (2) memahami proses administrasi dan interaksi dengan aparat; dan (3) bersedia berbagi pengalaman secara terbuka.

Observasi dilakukan selama tiga bulan di lapangan untuk mencatat interaksi sosial antara warga dan aparat desa, kegiatan musyawarah, serta proses penyaluran bantuan. Observasi ini penting untuk melihat praktik kewargaan tidak hanya dari apa yang dikatakan oleh warga, tetapi juga dari tindakan sehari-hari dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan seperti data penerima bantuan sosial, laporan desa, dan dokumen peraturan terkait untuk memperkuat analisis.

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik yang mengacu pada tahapan Miles dan Huberman (1994), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori seperti bentuk klaim kewargaan, strategi akses terhadap negara, peran perantara politik, serta persepsi warga terhadap keadilan sosial. Proses ini dilakukan secara iteratif antara data empiris dan kerangka teori, sehingga interpretasi yang dihasilkan bersifat reflektif dan grounded pada konteks sosial lapangan.

4. Hasil

Desa Aeng Batu-Batu, yang terletak di pesisir Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu wilayah nelayan tradisional yang kehidupannya sangat bergantung pada hasil laut. Masyarakat di desa ini sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan melaut dengan peralatan sederhana seperti jaring dan perahu kayu kecil. Ketergantungan pada cuaca dan hasil tangkapan membuat kondisi ekonomi mereka fluktuatif,

dan karena itu mereka termasuk kelompok yang paling rentan terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Dalam situasi demikian, akses terhadap program bantuan sosial dan kebijakan pemerintah menjadi salah satu jalur utama bagi nelayan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Namun, proses mengakses bantuan negara ini tidak berlangsung secara otomatis. Ia muncul melalui serangkaian interaksi sosial dan politik yang kompleks, yang di dalamnya warga harus mengajukan klaim, bernegosiasi, bahkan berkompromi dengan struktur kekuasaan lokal.

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Kruks-Wisner (2018) bahwa kewargaan di negara berkembang dijalankan melalui proses *claim making*, di mana warga secara aktif menuntut hak-hak sosial dari negara melalui berbagai bentuk tindakan. Dalam konteks Aeng Batu-Batu, klaim kewargaan bukan hanya tindakan administratif untuk mendapatkan bantuan, tetapi juga bagian dari proses politik yang memperlihatkan bagaimana warga memahami peran mereka sebagai warga negara dan bagaimana negara hadir di tingkat lokal.

4.1 Bentuk-bentuk Klaim Kewargaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aeng Batu-Batu mengembangkan tiga bentuk utama dalam melakukan klaim kewargaan, yaitu klaim langsung, klaim melalui perantara, dan klaim kolektif.

Klaim langsung dilakukan oleh individu yang berani mengajukan permohonan secara pribadi kepada aparat desa atau dinas terkait. Biasanya, bentuk klaim ini dilakukan oleh warga yang memiliki hubungan personal dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat. Seorang nelayan, misalnya, menceritakan:

“Saya langsung ke kantor desa minta nama saya dimasukkan di bantuan perahu. Kadang diterima, kadang disuruh tunggu. Kalau tidak datang langsung, biasanya tidak diingat.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa klaim langsung menjadi cara warga memastikan bahwa kebutuhan mereka terlihat oleh aparat. Namun, sebagaimana juga dikemukakan oleh Isin (2008) dalam konsep *acts of citizenship*, tindakan semacam itu bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk performatif dari kewargaan, di mana warga menegaskan eksistensinya di hadapan negara melalui tindakan langsung.

Selain klaim langsung, sebagian besar warga melakukan klaim melalui perantara. Perantara yang dimaksud bisa berupa kepala dusun, tokoh agama, atau bahkan broker politik yang berperan sebagai jembatan antara warga dan pemerintah. Dalam kasus Aeng Batu-Batu,

perantara sering kali menjadi figur kunci dalam menentukan siapa yang mendapat akses terhadap bantuan. Salah seorang informan SD menjelaskan:

“Kalau ada bantuan, biasanya lewat pak dusun atau orang yang dekat dengan kepala desa. Kita serahkan fotokopi KTP, nanti mereka yang urus. Kalau tidak lewat mereka, susah masuk.”

Klaim melalui perantara ini menunjukkan bagaimana struktur sosial lokal bekerja dalam konteks distribusi kebijakan sosial. Sebagaimana dicatat oleh Kruks-Wisner (2018), di banyak komunitas pedesaan, jalur formal negara sering kali tidak berfungsi tanpa adanya mediasi sosial. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan dan kedekatan sosial menjadi modal penting dalam praktik kewargaan di tingkat lokal.

Sementara itu, klaim kolektif dilakukan oleh kelompok nelayan yang berorganisasi secara informal untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Salah satu contoh yang ditemukan di Aeng Batu-Batu adalah kelompok nelayan yang bersama-sama mengajukan proposal bantuan alat tangkap. Dalam proses ini, mereka mengumpulkan data anggota dan menulis surat permohonan kepada dinas kelautan melalui rekomendasi kepala desa. Seorang ketua kelompok nelayan Informan HJ menuturkan:

“Kami sepakat buat kelompok supaya lebih kuat kalau mau ajukan bantuan. Kalau sendiri-sendiri, susah diperhatikan.”

Klaim kolektif seperti ini memperlihatkan dimensi solidaritas sosial yang memperkuat posisi warga dalam berhadapan dengan negara. Namun, prosesnya tetap sangat bergantung pada legitimasi politik di tingkat desa. Kadang, kelompok yang dianggap “tidak dekat” dengan pemerintah desa menghadapi hambatan dalam proses administrasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun kewargaan secara formal menjamin kesetaraan hak, dalam praktiknya klaim kewargaan masyarakat nelayan tetap dipengaruhi oleh relasi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak seimbang. Pandangan Marshall (1950) tentang hak sosial sebagai bagian dari kewargaan hanya dapat diwujudkan apabila negara mampu menjamin distribusi yang adil, sementara di Aeng Batu-Batu, keadilan tersebut masih bersifat selektif dan bergantung pada jaringan sosial.

4.2 Peran Aktor Lokal

Dalam proses klaim kewargaan di Aeng Batu-Batu, aktor lokal memainkan peran yang sangat penting. Kepala desa, perangkat dusun, dan tokoh masyarakat menjadi penghubung utama antara negara dan warga. Mereka berperan dalam menyeleksi penerima bantuan, menyusun daftar usulan, dan menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah. Namun, peran ini tidak selalu bersifat netral. Dalam banyak kasus, otoritas mereka digunakan untuk mengatur akses terhadap sumber daya dengan mempertimbangkan loyalitas politik atau kedekatan personal.

Kepala desa, misalnya, sering dianggap sebagai figur sentral yang mewakili negara di tingkat lokal. Ia menjadi sumber informasi utama sekaligus pengambil keputusan informal dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan. Salah seorang informan SA yang juga nelayan mengungkapkan:

“Kalau dekat dengan pak desa, urusan cepat. Kalau tidak, bisa-bisa nama kita tidak muncul. Tapi kalau musim pemilihan, semua dijanji akan dapat.”

Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana kewargaan di tingkat lokal terkait erat dengan dinamika politik elektoral. Hubungan antara warga dan aparat menjadi transaksional, di mana dukungan politik sering kali dipertukarkan dengan akses terhadap bantuan sosial. Fenomena ini sejalan dengan temuan Berenschot (2019) tentang patronase di politik lokal Indonesia, di mana bantuan negara sering menjadi alat mobilisasi dukungan politik.

Selain kepala desa, broker politik juga memainkan peran penting. Mereka berfungsi sebagai mediator informal antara warga dan pejabat pemerintahan. Seorang informan AB menyebutkan:

“Kalau tidak kenal langsung orang dinas, biasanya lewat orang tengah. Dia tahu jalannya, tapi kadang minta uang bensin atau tanda terima kasih.”

Peran broker ini memperlihatkan bahwa negara di tingkat akar rumput sering kali diakses melalui jaringan informal. Warga memahami bahwa prosedur formal saja tidak cukup; mereka harus membangun hubungan sosial dengan figur-figur tertentu agar klaim mereka direspons.

Dalam konteks teori Isin (2002), tindakan warga yang menegosiasikan hak melalui perantara ini dapat dipahami sebagai bentuk *acts of citizenship* yang bersifat adaptif. Warga berusaha memanfaatkan ruang sosial yang tersedia untuk mempertahankan hak mereka, bahkan jika ruang tersebut tidak ideal secara normatif. Dengan demikian, kewargaan di Aeng Batu-Batu bersifat performatif dan situasional, bukan semata produk hukum formal.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kewargaan di Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, tidak dapat dipahami semata sebagai hubungan administratif antara warga dan negara, tetapi sebagai proses sosial dan politik yang terus dinegosiasikan melalui tindakan sehari-hari. Masyarakat nelayan di desa ini menjalankan kewargaan dalam konteks yang penuh keterbatasan ekonomi dan struktur kekuasaan yang hierarkis, namun mereka tetap menunjukkan kapasitas untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam relasi negara-warga. Melalui praktik klaim kewargaan, warga nelayan tidak hanya berupaya mendapatkan akses terhadap bantuan sosial atau program pemerintah, tetapi juga menegosiasikan posisi mereka sebagai warga negara yang memiliki hak dan martabat.

Bentuk-bentuk klaim kewargaan yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan keragaman strategi yang digunakan warga untuk berinteraksi dengan negara. Klaim langsung, klaim melalui perantara, dan klaim kolektif mencerminkan berbagai cara warga menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan politik di tingkat lokal. Klaim langsung menunjukkan keberanian individu untuk menegaskan hak-haknya secara personal, meski sering kali berhadapan dengan keterbatasan akses. Klaim melalui perantara memperlihatkan bagaimana hubungan sosial menjadi modal politik dalam mengakses sumber daya, sedangkan klaim kolektif menandakan adanya kesadaran sosial dan solidaritas di antara sesama nelayan untuk memperkuat posisi tawar mereka terhadap negara.

Dalam kerangka teori Marshall (1950), hak sosial yang seharusnya menjadi elemen utama kewargaan modern masih dijalankan secara terbatas dan tidak merata di Aeng Batu-Batu. Negara belum sepenuhnya hadir sebagai penyedia jaminan sosial yang adil, melainkan sebagai entitas yang diakses melalui relasi personal dan negosiasi sosial. Namun, sebagaimana dikemukakan Kruks-Wisner (2018), tindakan warga dalam mengklaim hak-hak sosial merupakan bagian penting dari proses pembentukan negara itu sendiri. Dengan mengajukan klaim, warga tidak hanya meminta layanan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas negara di tingkat lokal.

Penelitian ini menyarankan perlunya negara memperkuat mekanisme partisipasi yang lebih setara di tingkat lokal, agar warga nelayan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mitra dalam perumusan dan evaluasi program sosial. Pemerintah desa perlu membangun transparansi dalam proses penentuan penerima bantuan, sementara lembaga masyarakat dapat memperkuat kapasitas kewargaan melalui pendidikan politik dan sosial. Dengan demikian, praktik klaim kewargaan masyarakat nelayan dapat bertransformasi dari sekadar strategi bertahan hidup menjadi bentuk partisipasi politik yang substantif, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., & Rasyid, R. (2016). Citizen engagement, deliberative spaces, and the consolidation of a post-authoritarian democracy: The case of Indonesia. *Critical Asian Studies*, 48(1), 20–46.
- Aryanto, D. A., Setiawan, A., & Wibowo, A. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan buruh di Pantai Sendangbiru Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 11(2), 150–162.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Auerbach, A. (2019). *Democracy without parties: Political parties and urban politics in India*. Cambridge University Press.
- Batara, A., Muflih, M. H., Murti, H. K., Muhtar, D. I., Salsabilah, D. T., & Syarifuddin, A. (2022). Pemberdayaan ibu-ibu PKK Desa Aeng Batu-Batu Kabupaten Takalar melalui pengolahan nugget dan bakso berbasis ikan tenggiri. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 7(2), 1–8.
- Berenschot, W. (2019). *Piety, power, and politics: Religious patronage and the state in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Clarke, J., Coll, K., Dagnino, E., & Neveu, C. (2014). *Disputing citizenship*. Bristol: Policy Press.
- Dagger, R. (2002). Republican citizenship. In B. S. Turner & E. F. Isin (Eds.), *Handbook of citizenship studies* (pp. 145–158). London: Sage Publications.
- Demima, J., Pangemanan, N., & Waworundeng, W. (2022). Fungsi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan (Suatu studi kasus di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–10.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam menjawab konsep negara welfare state dan tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(1), 23–33.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57.
- Haliim, W. (2019). Program dana hibah dalam perspektif politik distributif: Studi kasus Prodamas Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 2–9.
- Haryanto. (2017). Adaptation and continuities in clientelism in a fishing community in Takalar, South Sulawesi. *Contemporary Southeast Asia*, 39(3), 511–531.
- Hasriyanti, & Hendra. (2021). Diversifikasi pekerjaan sebagai strategi bertahan hidup rumah tangga nelayan di Galesong Utara. *Jambura Geo Education Journal (JGEJ)*, 2(2), 63–69.
- Hasriyanti. (2019). Persepsi nelayan menurut stratifikasi sosial tentang pendidikan anak di Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal LaGeografia*, 17(2), 87–91.
- Heywood, A. (2014). *Politik* (Edisi keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ichwan, S. (2002, Mei 12). Membangkitkan kekuatan ekonomi nelayan. *Harian Pagi Suara Merdeka*.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). *Handbook of citizenship studies*. London: Sage Publications.
- Kartal, F. (2001–2002). Liberal and republican conceptualizations of citizenship: A theoretical inquiry. *Turkish Public Administration*, 27–28, 45–58.

- Koopmans, R., & Statham, P. (1999). Political claims analysis: Integrating protest event and political discourse approaches. *Mobilization*, 4(2), 203–221.
- Koopmans, R., & Statham, P. (2001). Migrant claim-making in Germany, Great Britain and the Netherlands. *Revue Européenne des Migrations Internationales*, 17(2), 63–100.
- Kruks-Wisner, G. (2018). *Claiming the state: Active citizenship and social welfare in rural India*. Cambridge University Press.
- Kusnadi. (2009). *Nelayan dan kemiskinan: Strategi adaptasi dan jaringan sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Maiorano, D. (2021). The politics of claim-making in India. *Pacific Affairs*, 94(3), 465–486.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Metsola, L. (2018). Incremental dependencies: Politics and ethics of claim-making at the fringes of Windhoek, Namibia. *Journal of Southern African Studies*, 44(3), 162–187.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.
- Pogonyi, S. (2019). Europeanization of kin-citizenship and the dynamics of kin-minority claim-making: The case of Hungary. *Europeanization and Minority Political Agency*, 7(1), 45–67.
- Rizari, S., & Sudarmono, H. (2020). Artikulasi kekuasaan dalam masyarakat nelayan: Studi kasus klientelisme di pesisir Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(1), 1–16.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. London: Routledge.
- Rye, A., & Kurniawan, I. (2017). Claiming indigenous rights through participatory mapping and the making of citizenship. *Political Geography*, 61(1), 148–159.
- Satria, A. (2015). *Negara, pasar dan nelayan: Studi tentang politik ekonomi perikanan*. Yogyakarta: LKiS.
- Savirani, A., & Aspinall, E. (2017). *Electoral clientelism in post-authoritarian Indonesia: Structure, agency and power*. Yogyakarta: PolGov-UGM.
- Sholichah, N. (2017). Apresiasi masyarakat miskin terhadap layanan sosial dasar pemerintah. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 1(1), 1–21.
- Siregar, N. R., Suryana, A. A., & Ismail, A. (2017). Analisis tingkat kesejahteraan nelayan buruh alat tangkap gill net di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 8(1), 39–48.
- Suryaningsi, T. (2017). Kemiskinan masyarakat nelayan di Desa Aeng Batu-Batu Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 1(1), 49–62.
- Syarif, E., & Maddatuang. (2023). *Dinamika kemiskinan nelayan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Syam, M. Y. (2014). Analisis karakteristik nelayan buruh dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga nelayan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Manajemen*, 3(2), 115–124.
- Turner, B. S. (2001). The erosion of citizenship. *British Journal of Sociology*, 52(2), 189–209.
- Turner, B. S. (2009). *Contesting citizenship*. London: Routle